BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedua aturan tersebut menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus berpedoman kepada dokumen RKPD.

Pemerintah Daerah menyusun PPAS berdasarkan KUA sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Prioritas program dari masing-masing Perangkat Daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD. PPAS memuat program dan kegiatan yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan PPAS merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. PPAS Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan DPRD Kabupaten Padang Lawas, sebagai pedoman dalam menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi pengganggaran yang lebih rinci pada APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024. Dengan tersusunnya dokumen PPAS ini, pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, tentunya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024 yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing – masing program/kegiatan, yang nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan PPAS Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4757);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 159) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 01.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada : Peningkatan penanganan kesehatan. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan Kesehatan lainnya dan Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan.

Tabel 2.1
Realisasi dan Proyeksi Perkembangan Ekonomi
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 – 2024

Indikator	Realisasi	Proyeksi	Proyeksi
	2022	2023*	2024*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	4,00-4,50	6,75
PDRB perkapita ADHK (Rp juta)	32 730 179,31	34 636 039,11	36 719 348,05
PDRB perkapita ADHB (Rp Juta)	54 575 865,34	55 765 661,14	56 253 015,68
Inflasi (%)	6,10	6,72	6,85
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,90	3,25-3,50	4,90-5,20
Persentase Kemiskinan (%)	8,05	8,30-8,50	7,25-7,50
Gini Ratio (poin)	0,227	0,2185	0,1980
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	69,58	68,80-70,00	68,65-70,30

Sumber : BPS Padang Lawas, 2023
BPS SUMUT, 2023
Ket : * Data Sementara

Dari data diatas maka arah kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun Kabupaten Padang Lawas antra lain:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan sektor industri melalui penguatan produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan kemampuan dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor ekonomi kreatif melalui pelaksanaan pojok UMKM dan IKM; penguatan mutu dan standarisasi produk ekonomi kreatif; Mempromosikan produk-produk unggulan UMKM, Memberikan bantuan berupa sarpras perdagangan, serta penguatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Menjalin sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas; dan

6. Sinergitas semua OPD untuk melakukan perubahan dalam mencapai perekonomian masyarakat yang sejahtera, malakukan pembinaan terhadap UMKM/IKM, pembinaan terhadap tenaga kerja, sarana dan prasarana yang mendukung melalui program dan kegiatan, termasuk sinergitas sampai dengan kecamatan, kelurahan dan desa.

2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja *(perfomance based budgeting)* dan money follow program serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability)* yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, DAK maupun DID dan Dana Desa yang merupakan porsi terbesar dalam pendapatan

daerah di Kabupaten Padang Lawas dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini tentu saja harus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah. Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR). Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2023 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Padang Lawas berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU, & DAK) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dilihat dari sumbernya, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan atau hasil usaha di dalam daerah dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pendapatan yang diperoleh karena adanya transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta perolehan dari hibah akan dikelompokkan dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.2
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.277,00	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.128.122.508129,00	2,76	(3,50)	6,00	3,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	47.501.937.457,00	6,14	18,50	58,55	(84,93)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.058.939.820.972	35,82	(,82)	3,01	5,39
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	-	(85,97)	(100,00)	0,00	0,00
5	BELANJA	1.035.264.004.096,00	1.076.597.652.225,00	1.053.281.447.741,00	1.124.661.780.131,00	1.137.014.106.124,00	3,99	(2,17)	6,78	1,09
5.1	BELANJA OPERASI	582.197.337.553,00	633.728.776.587,00	630.470.986.646,00	685.795.447.416,00	721.007.988.227,00	8,85	(,51)	8,78	4,89
5.2	BELANJA MODAL	143.366.541.800,00	145.733.333.116,00	134.826.465.820,00	146.504.332.112,00	118.193.101.554,00	1,65	(7,48)	8,66	(23,20)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	4.267.313.878,00	(80,46)	37,53	(21,72)	31,08
5.4	BELANJA TRANSFER	295.716.184.597,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	289.421.110.465,00	292.825.702.465	(0,44)	(3,46)	1,83	1,16
	Total Surplus/(Defisit)	1.440.387.349,00	(11.233.613.948,00)	(25.253.553.041,91)	(34.940.201.878,00)	(8.891.597.995,55)	(879,90)	124,80	38,36	(2992,96)
6	PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.787.358.551,00	-	-	-	0,00	(100,00)	0,00	-
	Pembiayaan Netto	45.698.121.224,00	45.351.150.014,00	34.127.691.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	(0,76)	(24,75)	2,38	(292,96)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		47.138.508.565,00	34.117.536.066,36	8.891.597.995,45	-	-	(27,62)	(73,94)	(100,00)	(00,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penentuan kinerja pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Pendapatan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2022

Uraian	Realisasi			Rata-Rata Persentase Pertumbuhan
	2020	2021	2022	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	8,21
PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	11,67
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	0,00	(61,99)
JUMLAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.277,00	1.028.045.354.699,09	(0,25)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Padang Lawas sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 begitu juga dengan Pendapatan Transfer, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan. Pendapatan mendasari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Terhadap hal tersebut belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu adanya penyesuaian. Adapun deviasi target pendapatan dengan realisasi, lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal di luar RKPD Kabupaten Padang Lawas, seperti kenaikan dan/atau penurunan dana perimbangan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan DID serta penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari dana hibah maupun dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu lagi dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : 1) Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU serta Dana Transfer Khusus yaitu DAK fisik dan DAK non fisik), 2) Dana Insentif Daerah (DID) dan 3) dana desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi : hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan sumberdaya dan daya mampu daerah;
2. kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
3. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; RKPD Kabupaten Padang Lawas;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
6. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan

7. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023, meliputi :

1. Peningkatan PAD, dengan upaya :
   a. Mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
      1) Menyusun dan/atau merubah regulasi sebagai payung hukum bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
      2) Memperbaiki basis data Obyek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan secara berkala/periodik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi;
      3) Melaksanakan Penilaian PBB P2 secara kontinyu khususnya terhadap objek-objek pajak khusus untuk menyesuaikan nilai pajaknya;
      4) Melakukan penagihan terhadap pajak terhutang, dengan penagihan aktif maupun pasif;
      5) Melakukan Pemasangan Stiker Belum Bayar Pajak sebagai sanksi moral kepada wajib pajak;
      6) Melakukan pemantauan secara “open” maupun “silent” untuk mengetahui kesesuaian antara laporan dalam SPTPD yang disampaikan dengan fakta riil di lapangan;
      7) Melakukan pendekatan secara persuasif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;
      8) Melakukan kerjasama dengan Satpol PP sebagai penegak Perda dalam berbagai kegiatan optimalisasi pemungutan pajak;
      9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan semua *stakeholder* terkait ketentuan perpajakan;
      10) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah;
      11) Secara bertahap melakukan peninjauan NJOP Reklame dan NJOP PBB-P2; dan
      12) Memberikan reward melalui Gebyar Hadiah Pelunasan PBB P2 baik bagi wajib pajak maupun aparat pemungut tingkat RKPD Kabupaten Padang Lawas desa/kelurahan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan aparat pemungut tingkat desa/kelurahan.

b. Mengoptimalkan pendapatan Retribusi Daerah dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain :
   1) Menggali sumber-sumber retribusi daerah dengan memperluas pelayanan;
   2) Meninjau tarif retribusi yang pengenaan tarifnya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
   3) Mengintensifkan pemungutan retribusi daerah melalui penerapan e-retribusi; dan
   4) Mengoptimalkan pemungutan terhadap jenis retribusi baru seperti retribusi pelayanan tera/tera ulang.

c. Meningkatkan pendapatan dari Kekayaan Daerah yang di pisahkan dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
   1) Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
   2) Meningkatkan penyertaan modal secara selektif agar BUMD dapat melakukan ekspansi usahanya dan memberikan kontribusi yang optimal.

d. Mengoptimalkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1) Mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah yang idle melalui kerjasama atau bentuk perikatan lainnya;
   2) Mengoptimalkan tagihan daerah baik Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
   3) Melakukan penjualan barang milik daerah yang sudah dilakukan penghapusan; dan
   4) Melakukan investasi jangka pendek atas idle kas.

2. Meningkatkan penerimaan Dana Tranfer dengan upaya : meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, insentif daerah, dana desa) dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan).
3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan upaya : meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan RKPD Kabupaten Padang Lawas perundang-undangan.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian objek penerimaan Beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kebijakan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah kebijakan dalam kerangka APBD Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.4
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.276,00	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.128.122.508.128,00	2,76	(3,50)	6,00	3,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	44.055.621.274,00	46.759.609.981,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	47.501.937.457,00	6,14	18,50	58,55	(84,93)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	12.861.852.315,00	13.217.341.379,00	21.424.802.112,00	44.831.506.844,00	32.797.831.148,00	2,76	62,10	109,25	(36,69)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.467.318.627,00	3.257.490.666,00	14.688.479.262,00	9.864.020.884,00	2.950.964.000,00	32,03	350,91	(32,85)	234,26
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.347.617.748,00	5.074.401.622,00	3.958.461.193,13	7.000.000.000,00	3.958.461.193,00	116,15	(21,99)	76,84	76,83
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	26.378.832.584,00	25.210.376.314,00	15.336.278.485,96	26.154.009.116,00	7.794.681.116,00	(4,43)	(39,17)	70,54	(235,54)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.058.939.820.672,00	35,82	(0,82)	3,01	5,39
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	682.838.699.920,00	939.067.861.605,00	923.813.984.840,00	963.979.874.000,00	1.013.660.439.000,00	37,52	(1,62)	4,35	4,90
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	39.189.934.251,00	41.566.393.690,00	48.805.888.806,00	37.892.167.409,00	45.279.381.672,00	6,06	17,42	(22,36)	16,31
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	21.680.750.000,00	(85,97)	(100,00)	0,00	100
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	21.680.750.000,00	(85,97)	(100,00)	0,00	100

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah sesuai dengan kapasitas kemampuan pendanaan akan memperhatikan kebijakan belanja untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat sebagai berikut:

1. Alokasi belanja Prioritas RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yang merupakan Tahun kelima dengan difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya) khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Alokasi belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
3. Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji;
4. Penerimaan dari pajak daerah retribusi daerah akan di alokasikan kembali ke desa sebesar 10 persen;
5. Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastuktur publik;
6. Pengalokasian anggaran dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.
7. Pengalokasian anggaran Tahun 2024 disisihkan untuk anggaran kebutuhan dana pemilu.

Tabel 2.5
Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
5	**BELANJA**	**1.035.264.004.104,00**	**1.076.597.652.225,00**	**1.053.281.447.741,00**	**1.124.661.780.131,00**	**1.137.014.106.124,00**	**3,99**	**(2,17)**	**18.38**	**1,09**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**582.197.337.553,00**	**633.728.776.587,00**	**630.470.986.646,00**	**685.795.447.416,00**	**721.007.988.227,00**	**8,85**	**(0,51)**	**18.36**	**4,89**
05.01.01	Belanja Pegawai	365.904.697.961,00	336.613.956.837,00	351.057.657.291,00	385.635.990.081,00	442.955.113.418,00	(8,01)	4,29	20.23	12,94
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	199.908.800.677,00	239.912.143.070,00	262.234.172.820,00	281.863.618.420,00	217.013.097.042,00	20,01	9,30	11.39	(29,88)
05.01.05	Belanja Hibah	13.531.958.915,00	54.604.544.680,00	12.745.716.535,00	15.078.338.915,00	58.849.078.915,00	303,52	(76,66)	07.13	74,38
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.851.880.000,00	2.598.132.000,00	4.433.440.000,00	3.217.500.000,00	2.190.698.852,00	(8,90)	70,64	(27,43)	(46,87)
5.2	**BELANJA MODAL**	**143.366.541.808,00**	**145.733.333.116,00**	**134.826.465.820,00**	**146.504.332.112,00**	**118.913.101.554,00**	**1,65**	**(7,48)**	**15.52**	**(23,20)**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	-	3.106.646.000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.463.521.001,00	18.640.357.443,00	16.231.502.731,00	26.508.065.010,00	22.922.336.600,00	(73,17)	(12,92)	07.29	(15,65)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.982.874.265,00	53.492.045.002,00	56.280.047.562,00	52.475.533.749,00	16.338.550.000,000	181,79	5,21	(6,76)	(221,18)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.848.553.219,00	70.489.284.671,00	62.287.840.527,00	63.835.502.353,00	68.999.061.954,00	38,63	(11,64)	11.37	7,48
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.071.593.323,00	5.000.000,00	27.075.000,00	3.685.231.000,00	10.653.153.000,00	(99,88)	441,50	04.40	65,41
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.983.940.146,00**	**2.731.885.932,00**	**3.757.058.103,00**	**2.940.890.138,00**	**4.267.313.878,00**	**(80,46)**	**37,53**	**(21,72)**	**31,08**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	4.267.313.878,00	(80,46)	37,53	(21,72)	31,08
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**295.716.184.597,00**	**294.403.656.590,00**	**284.226.937.172,00**	**289.421.110.465,00**	**292.825.702.465**	**(0,44)**	**(3,46)**	**19.51**	**1,16**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.597.417.308,00	-	-	5.469.552.773,00	3.469.552.773,00	(100,00)	0,00	0,00	(57,64)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	294.118.767.289,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	283.951.557.692,00	289.356.149.692,00	0,10	(3,30)	(0,10)	1,87

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
6	**PEMBIAYAAN**	**45.698.121.223,00**	**48.925.867.116,00**	**34.145.151.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,55**	**7,06**	**(30,21)**	**2,33**	**(292,96)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**45.698.121.223,00**	**47.138.508.565,00**	**34.145.151.037,36**	**34.940.201.878,00**	**8.891.597.995,55**	**3,15**	**(27,56)**	**2,33**	**(292,96)**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.698.121.223,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	**(292,96)**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**1.787.358.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(100,00)**	**0,00-**	**0,00**
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.787.358.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023, data diolah

Tabel 2.7
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sub Kegiatan Prioritas dan Lokasi
RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**						
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**						
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berpedoman dari kondisi objektif pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2023 serta target pada tahun 2024 dengan mencermati berbagai permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan Kabupaten padang Lawas disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 serta visi dan misi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 maka ditetapkan tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 yaitu : **"Akselarasi Pencapaian Kabupaten Padang Lawas Bercahaya Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Ekonomi. Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Masyarakat dalam Pencapaian Pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang Bercahaya"**

Maka fokus pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**						
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**						
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038; (2) Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024; dan (6) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2024.

Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Padang Lawas periode 2020-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu masukan bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024, Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, amanat Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dan Dokumen Perencanaan Strategis lainnya.

Lebih lanjut, Perwujudan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 difokuskan pada Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan dalam serangkaian strategi dan arah kebijakan. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan, sasaran pencapaian pembangunan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		TARGET	
								2018	Target	Realisasi	2023	2024
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	1.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	65,00	68,00	C/40,05*	69,00	70,00
				1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	C	C	C	CC	B
						Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	70(Baik)	78(Baik)	93,71(Sangat Baik)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)
						Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WDP	WTP	WTP*	WTP	WTP
						Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	%	50	90	90*	95	100
2.	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender			IPM	Poin	67,59	68,00	69,58	68,80-70,00	68,65-70,30
				2.1.1	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	N/A	70,25	68,75	72,36	74,53
				2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	N/A	71,56	61,87	72,28	73,00

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		TARGET	
								2018	Target	Realisasi	2023	2024
				2.1.3	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,25	88,00	87,00	87,45	87,90
3.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	3.1	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB			Kontribusi PDRB PerKapita	Ribu (Rupiah)	N/A	28.497,88	54.575,87	28. 703,07	28.909,73
				3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	40,07	43,99	50,31	45,15	46,27
4.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang	4.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			Indeks Infrastruktur	Poin	75	80	80	84	88
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	72,04	70,99	72,60	73,12
				4.1.1	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Kondisi jalan mantap	Persen	14,76	56	25	59	62
						Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	59	68	66	75	80
						Rasio rumah layak huni	Persen	60,9	64	63	66	66
				4.1.2	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks kualitas Udara	Persen	80,00	75,00	92,47	80,00	85,00
						Indeks kualitas Air	Persen	60,00	64,00	58,75	77	78
						Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	95	100	95	100	100

MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2022		TARGET	
							2018	Target	Realisasi	2023	2024
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	5.1	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan local		Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	8*	12	12
					Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	6	4*	7	7
				5.1.1 Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	7*	12	12
				5.1.2 Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	5*	10	10
*Data Sementara											

Sementara itu Program Prioritas, kegiatan prioritas pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sub Kegiatan Prioritas dan Lokasi
RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**						
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**						
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.1. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Usulan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rencana kegiatan pada Perangkat Daerah. Usulan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas diliput pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.3

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Padang Lawas tahun 2023

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)					
1	**H. SYAHWIL NASUTION, SE**					
1	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Tanah Wakaf Desa Pasar Panyabungan Kecamatan Huta Raja Tinggi	Pasar Panyabungan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Masjid Al- Ikhlas Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi	Sigalapung	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
3	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan MCK Masjid Al-Ikhlas Desa Sigalapung Kecamatan Huta Raja Tinggi	Sigalapung	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
4	H. SYAHWIL NASUTION, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Tanah Wakaf (TPU) Desa Huta Raja Tinggi Kecamatan Huta Raja Tinggi	Huta Raja Tinggi	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2	**H. LOKOT NASUTION**					
5	H. LOKOT NASUTION	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan Tempat Mandi dan Tempat Wudhu di Masjid Desa Siundol Julu	Siundol Julu	Sosopan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
6	H. LOKOT NASUTION	Pembuatan MCK Permukiman	Pembangunan MCK di Masjid Aek Mage di Desa Siundol Jae	Siundol Jae	Sosopan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
7	H. LOKOT NASUTION	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Rabat Beton di Desa Huta Bargot	Huta Bargot	Sosopan	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	**MUHAMMAD YASIN HARAHAP**					
8	MUHAMMAD YASIN HARAHAP	Pembangunan Pagar Pendidikan	Pembuatan Pagar Pondok Pesantren Darul Ma'arif Gunung Inten	Gunung Inten	Barumun Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	MUHAMMAD YASIN HARAHAP	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pengadaan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Darul Ma'arif Gunung Inten Sebanyak 3 Ruang	Gunung Inten	Barumun Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	**H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH**					
10	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan Rabat Beton Pesantren Darul Falah Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
11	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan MCK Dan Sumur Bor Desa Tanjung Botung Kecamatan Sosa	Tanjung Botung	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	H. MHD. HAMIDI PASARIBU, SH	Pembangunan Jalan	Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mondang Kecamatan Sosa	Desa Mondang	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	**AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I**					
13	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani ke Saba Pasir Kecamatan Barumun Barat	Saba Pasir	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
14	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Pembukaan Jalan Usaha Tani Bulu Parapat Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Alat Pertanian	Pengadaan Alat Mesin pertanian Desa Barumun jae, 5 unit	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
16	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran Pondok Paramalan Parsulukan Al-Amran Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
17	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Pembukaan Jalan Usaha Tani Galanggang Baru Menuju Bulu Parapat Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan Tali Air Saba Manggu Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Dek Jembatan Bondar Irigasi Saba Sidongdong Desa Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Desa Parannapa Dolok Bire menuju Desa Hutaruhom Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Hutaruhom	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
21	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Raya Parannapa Jae Kecamatan Barumun Barat	Parannapa Jae	Barumun Barat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
22	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengadaan Ternak	Pengadaan Kelompok Tani Ternak Sahata Padang Hasior Kecamatan Sihapas Barumun	Padang Hasior	Sihapas	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
23	AMRAN PIKAL SIREGAR, S.Sos.I	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pengadaan Tali Air Saba Julu Desa Batu Sundung Kecamatan Barumun Barat	Batu Sundung	Barumun Barat	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)					
6	**NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH**					
24	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembuatan Pagar Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
25	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Pembuatan Kanopi Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
26	NANDA SERVINTA MUDA HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Penimbunan di Masjid Raya Baiturrahman Desa Huristak Kecamatan Huristak	Huristak	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)					
7	**H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
27	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Dari Desa Sabarimba menuju Saba Lappisi Kecamatan Barumu Baru (Lanjutan)	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru MTS Syakira Desa Janji Lobi	Janji Lobi	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
29	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Pendidikan Desa Sibuhuan Jae Menuju Jalur II Sisupak Sepanjang 2 KM	Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar Pemakaman (TPU) Sepanjang Kurang Lebih 300 M Didesa Mompang	Mompang	Barumun Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
31	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Bendungan Diaek Batang Taris Desa Mompang	Mompang	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sitarolo Julu Menuju Desa Pintu Padang (Lanjutan)	Sitarolo	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembngunan jalan dari parmata sapihak menuju Limbong lama (lanjutan) 1 paket	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
34	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan pagar mesjid Al-Abror Desa siolip 1 paket	Siolip	Barumun Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
35	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Aek Barumun (Desa Sabarimba)	Sabarimba	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Speaker Desa Tanjung Botung menuju Desa Sayur Matua 1 paket	Tanjung Botung dan Sayur Matua	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	H. IRSAN BANGUN HARAHAP, SE	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Desa Hasahatan Julu menuju Desa Siolip 1 Paket	Hasahatan Julu dan Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	**ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE**					
38	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Ulu Gajah Menuju Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah	Desa Ulu Gajah Menuju Desa Bahal Batu	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
39	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan Jalan Dari Desa Siboris Dolok Menuju Desa Pangirkiran Kecamatan Barumun Tengah	Desa Siboris Dolok Menuju Desa Pangirkiran	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
40	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran TPU Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
41	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pengadaan Ternak	Pengadaan Ternak Lembu Kelompok Tani Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
42	ERWIN SUWANDI HARAHAP, SE	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok Mesjid Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah	Gunung Manaon	Barumun Tengah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
9	**MARAGANTI HASIBUAN**					
43	MARAGANTI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran dranase kiri dan kanan jalan mayor Daulat Hasibuan	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	**MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi**					
44	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Parit Desa Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam	Botung	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
45	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan RKB(Ruang Kelas Baru) MDA AL-ISTIQOMAH Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
46	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan Pagar TPU Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
47	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Pembuatan MCK Permukiman	Pembuatan MCK Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
48	MUARA KUMPUL NASUTION, S.Psi	Tempat Pemondokan	Pembangunan Aula Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS SOSIAL
	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)					
11	**BAHARUDDIN DAULAY**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
50	BAHARUDDIN DAULAY	Pembangunan Jalan	Pembangunan Embung Aek Honas Desa Binanga	Desa Binanga	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)					
12	**SAHRUN HASIBUAN**					
51	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran kuburan desa sungai korang(lanjutan)	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
52	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Mesjid	Pembangunan mesjid taqwa muhammadiyah desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
53	SAHRUN HASIBUAN	Pengadaan Ternak	Pengadaan ternak lembu kelompok tani desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
54	SAHRUN HASIBUAN	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan jalan rabat beton desa sungai korang	Sungai Korang	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	SAHRUN HASIBUAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Madrasyah NU desa mananti	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
56	SAHRUN HASIBUAN	Pengadaan Ternak	Pengadaan ternak lembu kelompok tani desa Aliaga	Aliaga	Hutaraja Tinggi	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
13	**SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH**					
57	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembukaan Jalan	Pembukaan Jalan kekebun masyarakat wilayah pilar dan lappisi desa limbong dan desa siolip kecamatan barumun baru	Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
58	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan 1 Ruang kelas baru di MTS 7 Muhammadiyah desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru	Hasahatan Julu	Barumun Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
59	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan lingkar luar Desa Hasahatan Jae menuju Jalinsum	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
60	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Hasahatan Jae	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
61	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Plat Duiker 12 titik di jalan kebun masyarakat desa Simaninggir dan Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru	Siolip	Barumun Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM
62	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pengadaan Ternak	Pengadaan Bibit ternak lembu Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru	Hasahatan Jae	Barumun Baru	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
63	SUFRIADY HALOMOAN HASIBUAN, S.Pd, SH	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok Persulukan AN-NUR Desa Tanjung Baru Kecamatan Batang Lubu Sutam	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
14	**MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT**					
64	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Pembangunan Pagar Permukiman	Lanjutan Pembangunan Pagar Mesjid Al- Mukhlisin Desa Binanga Tolu Kecamatan Huristak	Binanga Tolu	Huristak	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
65	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan (Dengan Rabat Beton) Anak Desa Binanga Tolu - Rambin Paya Bujing Kecamatan HuristAK	Binanga Tolu	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan (Peningkatan Lapis Pondasi dengan peyertuan 500 Meter) Desa Bulu Cina Kecamatan Huristak	Bulucina	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
67	MHD. IKE TAKEN HASIBUAN, IR.MT	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pengadaan Air Bersih Dengan Sumur Bor Lengkap Dengan Tangki Penampung Kapasitas 2000 Liter dan 3 Buah Titik Distribusi di Desa Tor Sihoda-Hoda Kecamatan Huristak	Tor Sihoda-Hoda	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	**SYARIF LUBIS, S.E**					
68	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Mesjid	Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Air Bale Kec. Sosa	Air Bale	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
69	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Jembatan Mini Desa Rao Rao Dolok Kec. Sosa	Rao Rao Dolok	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
70	SYARIF LUBIS, S.E	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Alat Bermain TK Aba Pasar Ujung Batu Kec. Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
71	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Mesjid	Pembangunan Musollah Khaerul Amin Desa Aek Tinga Kec. Sosa	Aek Tinga	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
72	SYARIF LUBIS, S.E	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Sambungan Normalisasi Aek Takki Desa Pasar Ujung Batu Kec. Sosa	Pasar Ujung Batu	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
73	SYARIF LUBIS, S.E	Pengadaan Ternak	Pengadaan Ternak Lembu Kelompok Tani Berkemajuan Desa Aek Tinga Kec. Sosa	Aek Tinga	Sosa	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)					
16	**LUAT HASIBUAN**					
74	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan SMK N 1 Kecamatan Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
75	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehab Jalan Usaha Tani Singobuk desa Siadam Kec. Batang Lubu Sutam	Siadam	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
76	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kebun Rimbo Pinarik kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
77	LUAT HASIBUAN	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehab jalan Usaha Tani Galanggangayom desa Botung kec. Batang Lubu sutam	Botung	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
78	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Rabat Beton Desa Pinarik kec. Batang Lubu sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
79	LUAT HASIBUAN	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Rambin Sipasir desa Pinarik kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
80	LUAT HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Peningkatan jalan Pinarik - Papaso kec. Batang Lubu Sutam	Pinarik	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	**ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH**					
81	ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase telaga aek Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
82	ROMI PARMONANGAN NASUTION, SH	Pembangunan Paving Blok	Pembangunan Paving Blok masjid Babul Jannah Desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun	Paringgonan	Ulu Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
18	**H.TORKIS AFGANI HASIBUAN**					
83	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Rabat beton 200m, desa lubuk bunut, lorong 2 kecamatan hutaraja tinggi	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
84	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan paret dan gorong-gorong jalan, Desa Tanjung Ale 200m, Kec. Sosa Timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
85	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Penerangan Jalan	Pembuatan lampu jalan tenaga surya antara desa tanjung ale dan desa sigalagala sebanyak 20 buah lampu kec. sosa timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
86	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas baru sd negeri 0701 rotan sogo kec. hutaraja tinggi	Rotan Sogo	Hutaraja Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
87	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton 300m desa parmainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
88	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase atau parct jalan 200m desa permainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
89	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Penerangan Jalan	Pemasangan lampu jalan 16 titik desa parmainan kec. hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
90	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Pagar Permukiman	Pemagaran tanah wakaf 100m desa mananti kecamatan hutaraja tinggi	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
91	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan sarana dan prasarana mesjid desa mananti	Mananti	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
92	H.TORKIS AFGANI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan gantung / rambin sungai sosa di desa lubuk bunut	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)					
18	**ARFIN HASIBUAN, M.Pd**					
93	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan keliling Desa Manggis	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
94	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Sumur Bors	Pembangunan sumur bors desa tanjung baru	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
95	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	pembangunan DEK jalan desa tanjung baru	Tanjung Baru	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan Pagar Permukiman	Pembangunan TPU Desa Manggis	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
97	ARFIN HASIBUAN, M.Pd	Pembangunan Jalan	Pembangunan Rabat Beton PON-PES Babul Hasanah	Desa Manggis	Batang Lubu Sutam	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	**ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos**					
98	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pembangunan Jalan	Pengerasan Jalan Galabonang Menuju SMP Negeri 1 Atap Tobing Jae	Galabonang	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
99	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan / Pengerasan Jalan Sigading Menuju Simpang Babinsa	Sigading	Huristak	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mobiler Sekolah yayasan Islamic center Nurhamidah	Pasar Binanga	Barumun Tengah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
101	ELFIN HAMONANGAN HARAHAP, S.Sos	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mobiler MDTA Babussalam Siala Gundi	Sialagindi	Huristak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
20	**H. FAHMI ANWAR NASUTION**					
102	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru Ponpes Ali Baharuddin Kel Pasar Sibuhuan	Sigala-gala	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
103	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT Insan Robbani Kel. Pasar Sibuhuan	Lingkungan IV Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
104	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru Ponpes Almukhlisin Kel. Pasar Sibuhuan	Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
105	H. FAHMI ANWAR NASUTION	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan Jalan Setapak Tanah Wakaf Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Lingkungan II Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	PARTAI DEMOKRAT					
21	**MHD.DAYAN HASIBUAN, SH**					
106	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa parmainan kec hutaraja tinggi	Parmainan	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
107	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa lubuk bunut kec hutaraja tinggi	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
108	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton desa lubuk bunut	Lubuk Bunut	Hutaraja Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
109	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Jembatan	Pembangunan box culverb desa pir trans sosa 4	Pir Trans Sosa IV	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
110	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan Mesjid	Pembangunan teras masjid annur aek tong tong pasar sibuhuan kec barumun	Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan,	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
111	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa simangambat kec sosa timur	Simangambat	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
112	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa gunung inten	Gunung Inten	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
113	MHD.DAYAN HASIBUAN, SH	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan drainase desa tanjung ale kec sosa timur	Tanjung Ale	Sosa Timur	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	**HASAN BASRI HASIBUAN**					
113	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa siborna kec sosa julu	Siborna	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
114	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan bronjong desa pasir julu kec. sosa julu	Pasir Julu	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
115	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Sekolah	Rehab MDA desa mananti sosa julu	Mananti Sosa Julu	Sosa Julu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
116	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan rambin aek sosa desa siginduang	Siginduang	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
117	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Mesjid	Pembangunan menara masjid desa ampolu	Ampolu	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
118	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pengadaan saringan air bersi desa tanjung bale kec.sosa	Tanjung Bale	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
119	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
120	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa janji raja kec sosa	Janji Raja	Sosa	DINAS PEKERJAAN UMUM
121	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa ramba kec sosa julu	Ramba	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
122	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jembatan	Pembangunan rambin desa tanjung kec sosa julu	Tanjung	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
123	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan Setapak	Pembangunan rabat beton desa roburan	Roburan	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
124	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pengadaan tiang listrik desa hurung jilok	Hurung Jilok	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
125	HASAN BASRI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PEKERJAAN UMUM
126	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa pasir jae kec sosa julu	Pasir Jae	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
127	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa tanjung bale kec sosa	Tanjung Bale	Sosa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
128	HASAN BASRI HASIBUAN	Rehab Mesjid	Rehab masjid desa sungaI Jior kec sosa julu	Sungai Jior	Sosa Julu	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
23	**PADELI ASHARI HASIBUAN**					
129	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Banua Tonga menuju Batang Bulu Baru	Banua Tonga	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
130	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan Jalan	Pengerasan jalan sihoping di Desa Batang Bulu Lama	Batang Bulu Lama	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
131	PADELI ASHARI HASIBUAN	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Perit Pembuangan air di Desa Pagur Satio	Pagur Satio	Barumun Selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)					
24	**MUHAMMAD ALWI LUBIS**					
132	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembuatan Bronjong di Sungai Aek Godang Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
133	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Dek Penahan Banjir di Sungai Aek Godang Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
134	MUHAMMAD ALWI LUBIS	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Desa Janjilobi	Janjilobi	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	**RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS**					
135	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Aula Sekolah	REHAB BERAT AULA TERBUKA TK SUTAN SINALOAN LUBIS	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
136	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pengadaan Ternak	Pengadaan Lembu kelompok tani desa pasar latong kecamatan lubuk barumun	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
137	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Rehab Mesjid	Rehab Menara Mesjid AL MARDIYAH PASAR LATONG Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
138	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang kelas baru TK Sutan Sinaloan	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
139	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	pengaspalan jalan desa pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
140	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan lingkar pekan pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
141	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan lingkar lr 1 desa pasar latong	Pasar Latong	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
142	RAJA ASLIN SINALOAN LUBIS	Pembangunan Jalan	Pengaspalan jalan desa huta dolok	Huta Dolok	Lubuk Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)					
26	**H. PULI PARISAN LUBIS, Lc**					
143	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Dilingkungan VI Pasar Sibuhuan	Pasar Sibuhuan	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
144	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Bronjong/ Penahan Air Sungai Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
145	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Rehab Sekolah	Pembangunan Rehab Sekolah MDA Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
146	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
147	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan Air Bersih Di Desa Sibual-Buali	Sibual-Buali	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	H. PULI PARISAN LUBIS, Lc	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Pembangunan Air Bersih Di Desa Paringgonan Julu	Paringgonan Julu	Ulu Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)					
27	**RAJA PARLINDUNGAN NST, ST**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
149	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Desa Purba Tua Kecamatan Barumun	Purba Tua	Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
150	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Ad-Du'a Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun	Bulu Sonik	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
151	RAJA PARLINDUNGAN NST, ST	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembangunan Menara Mesjid Al-Khuldi Desa Bangun Raya Kecamatan Barumun	Bangun Raya	Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
29	**KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked**					
152	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Padang Garugur Jae Kec. Aek Nabara Barumun	Padang Garugur Jae	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
153	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Aek Nabara Jae / Pakkal Dolok, Kec. Aek Nabara Barumun	Aek Nabara Jae / Pakkal Dolok	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
154	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembuatan Dek Penahan Bendungan Aek Ukka Desa PP Makmur Kec. Barumun Tengah	PP Makmur	Barumun Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM
155	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid	Pembuatan MCK Mesjid Di Desa Sipagabu, Kec. Aek Nabara Barumun	Sipagabu	Aek Nabara Barumun	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
156	KHOLID MULIA DAULAY, S.Ked	Rekonstruksi Jalan	Penyertuan Jalan Aek Nalomlom Desa Padang Garugur Jae, Kec. Aek Nabara Barumun	Padang Garugur Jae	Aek Nabara Barumun	DINAS PEKERJAAN UMUM
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)					
30	**JENTI MUTIARA**					

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN
157	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan RT. 11 Desa Ujung Batu V, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
158	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Desa Ujung Batu III, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu III	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
159	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ujung Batu I, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu I	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
160	JENTI MUTIARA	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Penggantian Lantai Jembatan Sungai Meranti Desa Ujung Batu II, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu II	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
161	JENTI MUTIARA	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Ujung Batu IV, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu IV	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
162	JENTI MUTIARA	Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Desa Ujung Batu V Menuju Desa Ujung Batu I, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM
163	JENTI MUTIARA	Pembangunan Jembatan	Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Ledoan Desa Ujung Batu V, Kec. Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	Hutaraja Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024

Perencanaan program dan kegiatan harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sehingga alur dokumen PPAS mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RKPD. Perencanaan pada dokumen PPAS Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Rencana Belanja Sementara Daerah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 1.137.014.106.124,00. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh OPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sarat layanan minimal.

. Belanja daerah tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait terhadap pelayanan dasar, pelayanan urusan wajib yang tidak terkait terhadap pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Lawas tahun 2024.

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan			
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.036.704.391.445,00	1.065.364.038.277,00	1.028.027.894.699,09	1.089.721.578.253,00	1.128.122.508129,00	2,76	(3,50)	6,00	3,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.055.621.274,00	46.759.609.982,00	55.408.021.053,09	87.849.536.844,00	47.501.937.457,00	6,14	18,50	58,55	(84,93)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.028.634.171,00	980.634.255.295,00	972.619.873.646,00	1.001.872.041.409,00	1.058.939.820.972	35,82	(,82)	3,01	5,39
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	270.620.136.000,00	37.970.173.000,00	-	-	-	(85,97)	(100,00)	0,00	0,00
5	BELANJA	1.035.264.004.096,00	1.076.597.652.225,00	1.053.281.447.741,00	1.124.661.780.131,00	1.137.014.106.124,00	3,99	(2,17)	6,78	1,09
5.1	BELANJA OPERASI	582.197.337.553,00	633.728.776.587,00	630.470.986.646,00	685.795.447.416,00	721.007.988.227,00	8,85	(,51)	8,78	4,89
5.2	BELANJA MODAL	143.366.541.800,00	145.733.333.116,00	134.826.465.820,00	146.504.332.112,00	118.193.101.554,00	1,65	(7,48)	8,66	(23,20)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.983.940.146,00	2.731.885.932,00	3.757.058.103,00	2.940.890.138,00	4.267.313.878,00	(80,46)	37,53	(21,72)	31,08
5.4	BELANJA TRANSFER	295.716.184.597,00	294.403.656.590,00	284.226.937.172,00	289.421.110.465,00	292.825.702.465	(0,44)	(3,46)	1,83	1,16
	Total Surplus/(Defisit)	1.440.387.349,00	(11.233.613.948,00)	(25.253.553.041,91)	(34.940.201.878,00)	(8.891.597.995,55)	(879,90)	124,80	38,36	(2992,96)
6	PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.698.121.224,00	47.138.508.565,00	34.145.151.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	3,15	(27,56)	2,33	(292,96)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	1.787.358.551,00	-	-	-	0,00	(100,00)	0,00	-
	Pembiayaan Netto	45.698.121.224,00	45.351.150.014,00	34.127.691.037,36	34.940.201.878,00	8.891.597.995,55	(0,76)	(24,75)	2,38	(292,96)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		47.138.508.565,00	34.117.536.066,36	8.891.597.995,45	-	-	(27,62)	(73,94)	(100,00)	(00,00)

Proyeksi belanja daerah tahun 2024 selanjutnya di jabarkan dalam rencana pagu indikatif per organisasi perangkat daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 5.2
Rencana Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2024

NO	NAMA OPD	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	314.956.722.203,00
2	DINAS KESEHATAN	116.793.355.622,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	38.818.266.734,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	95.323.440.643,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DANPERHUBUNGAN	15.645.083.616,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMKEBAKARAN	4.385.257.351,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.816.022.015,00
8	DINAS SOSIAL	6.004.952.919,00
9	DINAS TENAGA KERJA	2.175.342.376,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.738.005.764,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.570.949.671,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.888.582.754,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	3.370.378.481,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.137.047.666,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.319.724.061,00
16	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN	2.871.915.958,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU	2.522.923.216,00
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.462.246.408,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.691.206.089,00
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.876.955.263,00
21	DINAS PERTANIAN	13.808.014.929,00
22	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	22.434.490.440,00
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN	38.250.073.501,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.739.245.640,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSETDAERAH	316.454.668.925,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.102.818.573,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA	5.816.138.947,00
28	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANGLAWAS	6.922.833.715,00

NO	NAMA OPD	PAGU INDIKATIF
29	KECAMATAN BARUMUN	2.170.369.949,00
30	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2.132.926.381,00
31	KECAMATAN HURISTAK	1.423.412.926,00
32	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1.087.917.162,00
33	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	1.950.160.582,00
34	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	2.302.767.693,00
35	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1.492.085.255,00
36	KECAMATAN SOSA	2.222.939.861,00
37	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	1.951.008.596,00
38	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1.377.637.996,00
39	KECAMATAN ULU BARUMUN	1.470.392.338,00
40	KECAMATAN SOSOPAN	1.455.066.960,00
41	KECAMATAN BARUMUN BARU	1.058.908.213,00
42	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1.385.487.729,00
43	KECAMATAN SOSA JULU	1.374.659.784,00
44	KECAMATAN ULU SOSA	1.522.202.070,00
45	KECAMATAN SOSA TIMUR	1.631.191.905,00
46	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52.108.307.244,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023
Sumber: Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023

Adapun rincian program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2024 yang disertai dengan sasaran dan perioritas pembangunan tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran rencana program dan kegiatan tahun 2024. Rencana pembangunan di Kabupaten Padang Lawas dapat ditujukan untuk mencapai pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dalam rencana kerja program kegiatan serta dengan anggaran yang ada pada perangkat daerah. Program prioritas pembangunan merupakan sasaran pembangunan utama baik nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. Program dapat mendukung prioritas rencana kerja pembangunan pemerintahan merupakan keberhasilan suatu daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 memberikan dukungan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5.3

Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**						
	a.	Pendidikan sejak dini melalui PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	e.	Peningkatan cakupan Jaminan Kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
2.	**Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur**						
	a.	Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	254.204.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	c.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.388.940.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48.949.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	d.	Meningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.194.108.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Terutama Dalam Sektor Pertanian Dan Perkebunan**						
	a.	Promosi produk unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Promosi dan pengembangan branding wisata daerah.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
	c.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.029.297.246	Dinas Pekerjaan Umum
4.	**Mendukung Kebijakan Nasional dan Provinsi**						
	a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.486.290.000	Dinas Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.837.600	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	101.600.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	31.080.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.183.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.363.720.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	70.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Puskesmas	18.616.917.000	Dinas Kesehatan
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.254.842.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	Rumah Sakit Umum Daerah
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	c.	Belanja APIP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
					Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
	d.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	171.915.997	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	195.236.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	269.336.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	167.357.009	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	e.	Sukses Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Tahun 2024	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Kabupaten/Kegiatan Strategi		Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.001	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Lawas, 2023

5.2. Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

Rencana pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyusun rencana program dan kegiatan disertai anggaran, yang juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan prioritas nasional Tahun 2024. Adapun ringkasan dari dukungan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas terhadap prioritas nasional disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 5.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.068.786.463	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40,590,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	111,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	37,218,267	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.000.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	63.747.000	DINAS PERTANIAN
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan danmenjamin pemerataan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	135.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	66.303.674	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	154.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.897.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.289.818.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.215.867.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	540,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.840.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.290.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Vaksin	141,600,000	DINAS KESEHATAN
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	243,837,600	DINAS KESEHATAN
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	31,080,000	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	370,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	193,742,000	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	20,884,357,000	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,061,100,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40,000,000	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	116,046,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	515,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	105.220.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	187.046.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,769,810,180	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1,300,557,606	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	433,707,120	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	202.862.460	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	265.181.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.194.108.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	di Daerah Kabupaten/Kota			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,029,297,246	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	265,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	93.236.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	75.870.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	92.907.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,388,940,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	48,949,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	120.500.000	DINAS SOSIAL
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.007.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.217.835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.032.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	116.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	143.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.559.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	58.397.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76.774.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	44.163.689	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.914.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.025.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.652.260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.315.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	440.774.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.205.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86.065.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.779.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.615.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.725.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.550.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.363.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	74.553.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.703.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.583.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.787.680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	47.723.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.267.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	143.130.470	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	43.319.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.513.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94.736.810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.724.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.035.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.280.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.730.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	181.050.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	199.842.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.179.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.172.630	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.899.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.132.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	132.935.900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.963.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.813.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.598.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengamanan Barang Milik Daerah	400.430.400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penilaian Barang Milik Daerah	76.333.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.283.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	85.167.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.351.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70.895.200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68.568.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104.527.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	133.995.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.240.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	129.475.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.466.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	61.045.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penagihan Pajak Daerah	70.410.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	88.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80.247.602	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Nasional	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	91.970.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.845.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.574.200	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

5.3. Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Pencapaian Prioritas pembangunan Sumatera Utara tersebut diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan pada tahun 2024 yang meliputi:

1. Ketenagakerjaan;
2. Pendidikan;
3. Konektivitas;
4. Kesehatan;
5. Nilai Tambah Sektor Agraris;
6. Nilai Tambah Sektor Pariwisata;
7. Sosial Kemasyarakatan dan Olah Raga;
8. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 didukung dengan kegiatan terintegrasi yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023, kegiatan terintegrasi tersebut antara lain:

1. Masyarakat Miskin Produktif (MAMIPRO);
2. Kesejahteraan Nelayan (Sayang Nelayan);
3. Dokter Terbang;
4. Peningkatan Produktivitas padi 8 ton;
5. Kawasan Peternakan Terpadu;
6. Taman Wisata Hutan (Ekowisata);
7. *Smart Floating Farm;*
8. Pengembangan wisata mangrove;
9. Wisata Religi;
10. Guru Terbang / Guru Lintas Sekolah;
11. Pilot Project 5 sekolah yang bersih dan indah di Medan;
12. Taman Kota Digital;
13. *Botanical Garden*;
14. Pengendalian Banjir Kota Medan dan Sekitarnya;
15. TPA Regional;
16. *Sports Center;*
17. *Islamic Center;*
18. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Penanganan dampak Covid-19;
19. Desa Wisata Bunga Dan Buah;

20. Desa Wisata Tenun;
21. Desa/Kota Wisata Sejarah dan Budaya;
22. Desa Wisata Kopi;
23. Desa Wisata Bahari;
24. Desa Mandiri Pangan
25. Desa/Kota Tangguh Bencana;
26. Desa/Kota Literasi;
27. Desa/Kota sehat bermartabat;
28. Desa Keluarga Bermartabat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 memberikan dukungan sebagai berikut :

Tabel 5.5
Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.181.391.129	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.652.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.778.834.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.671.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	234.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.188.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Laboratorium	1.965.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	242.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.348.608.871	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	875.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	198.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	735.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	147.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	740.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	816.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	126.798.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	540,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.840.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.290.000	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.732.423.960	DINAS KESEHATAN
				Pengadaan Obat, Vaksin	141,600,000	DINAS KESEHATAN
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	243,837,600	DINAS KESEHATAN
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	31,080,000	DINAS KESEHATAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	370,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	193,742,000	DINAS KESEHATAN
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Puskesmas	20,884,357,000	DINAS KESEHATAN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,061,100,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	96,000,000	DINAS KESEHATAN
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	40,000,000	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	444.400.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.529.614.400	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	337.020.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.280.750.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	621.008.700	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	116,046,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	515,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	105.220.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	187.046.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.897.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.289.818.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.215.867.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inlusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.068.786.463	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Lokal	300,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100,000,000	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40,590,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	111,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	185.000.000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	37,218,267	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150.000.000	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	63.747.000	DINAS PERTANIAN
3	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.254.911.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9.194.108.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pemeliharaan Rutin Jalan	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Rekonstruksi Jalan	20.568.816.574	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Pembangunan Jembatan	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,029,297,246	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.007.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.217.835	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.025.798.915	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	49.999.950	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.032.900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	116.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	143.074.350	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.559.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	58.397.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	43.734.897.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76.774.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	44.163.689	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	355.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.914.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.025.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.239.652.260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.315.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	440.774.050	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.205.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86.065.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.779.850	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.615.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	136.725.190	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.550.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.363.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	74.553.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.703.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.583.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.787.680	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	47.723.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.267.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	143.130.470	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	43.319.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.513.100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94.736.810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.724.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	121.035.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.280.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.730.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	181.050.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	199.842.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.179.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.172.630	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.899.700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.666.250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	174.132.850	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	132.935.900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.963.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.813.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	53.598.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengamanan Barang Milik Daerah	400.430.400	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penilaian Barang Milik Daerah	76.333.600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.283.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	85.167.500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.351.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	70.895.200	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	68.568.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	10.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	24.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104.527.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	133.995.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.240.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	129.475.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.466.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	61.045.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Penagihan Pajak Daerah	70.410.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	88.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80.247.602	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	40.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	91.970.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	RKPD Padang Lawas Tahun 2024				OPD Penangung Jawab
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.845.000	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	53.574.200	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.676.063.900	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	895.556.750	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
				Reviu Laporan Kinerja	392.677.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.368.500	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 6.1

Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Padang Lawas

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	
			Target	Realisasi
1	IPM	Persen	68,00	69,58
2	Persentase Kemiskin	Persen	7,75	8,05
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,5	4,61
4	Rasio Gini	Poin	0,218	0,227
5	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4,00	5,90
6	PDRB Perkapita (ADHK)	Nilai (Rp)	34.024.43	14.586,76

6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi
			2022	2022
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	68,00	40,05*
2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,00	87,00
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,04	70,99
	Indeks Kualitas Udara	Persen	75,00	92,47
	Indeks Kualitas Air	Persen	64,00	58,75
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	100	9,02*
6	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	78 (Baik)	93,71 (Sangat Baik)
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	Tahun	9,75	9,31
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	146

6.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Berikut adalah Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas.

untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*).

Tabel 6.3

Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,39	33,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,5	91,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86,5	88,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,32	94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan			
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	7,01%	100%	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS RujukanTingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	0,02%	100%	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	64,60%	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	52,29%	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	52,27%	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	28%	Dinas Kesehatan

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96,73%	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	6,50%	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	48%	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	10,25%	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	30%	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	59,90%	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	18,50%	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	70	75,6	Dinas Pekerjaan Umum
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 4.846 x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	70	75,6	Dinas Pekerjaan Umum
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	35	34,6	Dinas Pekerjaan Umum
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	20%	20,50%	Dinas Pekerjaan Umum
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	60%	60%	Dinas Pekerjaan Umum
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	250	283	Dinas Pekerjaan Umum
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
	Perumahan Rakyat			

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	95%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	63,493	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	92,3	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	67%	65%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	40 Menit	35 Menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	20%	25,50%	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	Dinas Sosial
Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	12,00%*	21,09%*	Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
2	Rasio PAD	90%*	8,50%*	Badan Pendapatan Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3*	Level 2*	Badan Pendapatan Daerah
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3*	Level 2*	Badan Pendapatan Daerah
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	100% *	79%*	Badan Pendapatan Daerah
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP*	Badan Pendapatan Daerah
	Pengadaan			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	3%	1%	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	60%	18%	Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60%	45%	Sekretariat Daerah
	Kepegawaian			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	740	855	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26,1	75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27,1	69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Manajemen Keuangan			
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	100%*	94,64%*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	100%*	75%*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
3	Manajemen Aset	Ada	Ada*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	100%*	100%*	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	4127.00	4.223,69	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Pariwisata			

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	50%	25,45%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	50%	16,38%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5.000.000	5.000.00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5.000.000	5,500,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pertanian			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,5	4,2	Dinas Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kasus : 15	Jumlah kasus : 91	Dinas Pertanian
		persentasi penurunan 2,00%	persentasi penurunan 5,00%	Dinas Pertanian
	Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,50%	0,36%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	75%	68,70%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP bertanda terasah yang berlaku	2,50%	4,80%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	20	44	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10	13	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	Tersedianya informasi ndustry secara lengkap dan terkini	100%	60%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Tenaga Kerja			
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	30%	35%	Dinas Tenaga Kerja
2	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	6503%	6511%	Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
3	Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	30%	35%	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,50%	0,02%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01%	0,01%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,77%	1,55%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pangan			
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100%	0%	Dinas Ketahanan Pangan
	Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,04%	70,99%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	10,12%	13%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	11,11%	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Perekaman KTP elektronik	100%	90%*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50%	12,55%*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	95%	86%*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	7 OPD	3 OPD*	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	8%	7,90%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	1%	0,33%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	3,63	3,67	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	60%	10,56%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18%	28%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Perhubungan			
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,000149	0,000149	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
		0,025 smp / jam	0,025 smp / jam	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,67	0,67	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	79%	0%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80%	70%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	25%	4%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	25%	30%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator	2022		OPD Penanggung Jawab
		TARGET	REALISASI	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	20%	25%	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Penanaman Modal			
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	100%	106,71%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100%	59,51%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50.000	73,38%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	Peningkatan prestasi olahraga	1	0	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Persandian			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	3%	2%*	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kebudayaan			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	5	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perpustakaan			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	18,09	7	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Kearsipan			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	17,75	17,75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	13,83	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip

6.4. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM di tetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan spm tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator spm dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Mengumpulkan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan target indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.4
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Padang Lawas

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
I	**Pendidikan**							
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	100%	33.83	100%	100%
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-15 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	100%	99.69	100%	100%
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-18 Tahun Yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	100%	2.46	100%	100%
II	**Kesehatan**							
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	64,66%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52,29%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52,27%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	28,0%	100%	100%

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	96,73%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	6,5%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	48%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hiipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	10,25%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	30%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	50,90%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodefici ency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	18,5%	100%	100%
III	**Pekerjaan Umum**							

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	3%	Setiap Tahun	3%	3%	5%	7%
	Penyediaan layanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	100%	-	-	-
IV	**Perumahan Rakyat**							
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	0	100%	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	0	100%	100%
V	**Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindugan Masyarakat**							
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%

No	Dinas	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2022		Proyeksi	
					Target	Realisasi	2023	2024
	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%
VI	**Sosial**							
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	14,53%	100%	100%
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	8,08%	100%	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	23,9%	100%	100%
	Rehabiltasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	13,04%	100%	100%
	Perlindugan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	100%	90%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

PPAS Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 merupakan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Padang Lawas yang memuat skala prioritas pembangunan, prioritas program untuk masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan untuk periode satu tahun.

Penyusunan dokumen PPAS ini telah melalui seluruh tahapan secara sistematis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar yang ditempuh dalam merampungkan dokumen PPAS ini yaitu melalui dokumen KUA Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas. Hasil penyusunan PPAS Kabupaten Padang Lawas merupakan panduan untuk penyusunan RAPBD tahun 2024.

Plt. BUPATI PADANG LAWAS

Drg. H AHMAD ZARNAWI PASARIBU. CHt. MM. Msi.